

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. UMKM berperan penting di negara maju tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

UMKM juga berperan sangat penting di negara sedang berkembang, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun, dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) dan ekspor non migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di negara sedang berkembang relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju (Tambunan, 2009).

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dalam perekonomiannya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah unit paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Stabilitas ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian dari

penduduk yang keterbatasan ekonomi menjadi semakin miskin karena tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. UMKM merupakan basis ekonomi bangsa yang dapat menjadi alternatif pilihan guna mengangkat perekonomian negara dari keterpurukan. UMKM merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi karena dapat membantu pemulihan ekonomi dengan pendapatan yang diperoleh (Brasoveanu dan Balu, 2014).



Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2010:1-2017:4

Gambar 1.1 Pendapatan UMKM di Indonesia Tahun 2010:1-2017:4

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2010:1-2017:4, pendapatan UMKM meningkat dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan pendapatan UMKM mengalami fluktuasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2017) pendapatan tertinggi terjadi pada triwulan IV-2017 sebesar 1.986.664 miliar rupiah. Meskipun demikian, sebenarnya triwulan IV-2017 terjadi perlambatan kegiatan usaha terutama disebabkan oleh penurunan kegiatan usaha pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Kontraksi kegiatan usaha pada triwulan IV-2017

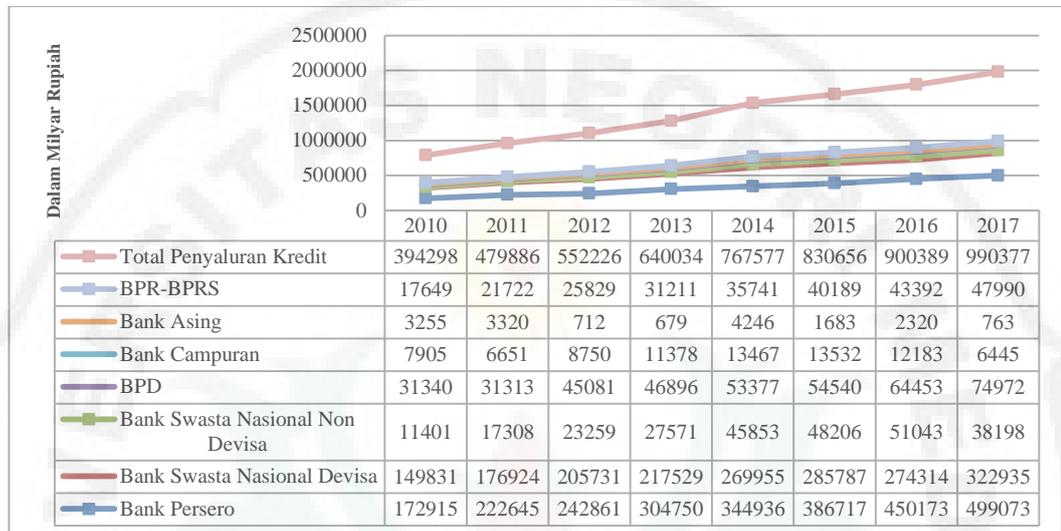
disebabkan oleh faktor musiman dan kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas pertanian (Laporan Survey Kegiatan Dunia Usaha, Triwulan IV-2017).

Meskipun secara nominal nilai tambah UMKM naik turun tiap tahunnya akan tetapi usaha besar tetap memberikan kontribusi terbesar baik itu berdasarkan proporsi dan kuantitas. Kedudukan UMKM dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlah unit UMKM yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. UMKM juga memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika benar-benar dikembangkan dengan baik.

Kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam hal ini, adalah tenaga kerja yang belum memiliki skill yang memadai karena kurangnya pelatihan pada tenaga kerja, kelemahan akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses untuk mendapatkan bantuan modal dari Bank, kelemahan akses pada informasi dan teknologi yang terbaru, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan.

Berdasarkan teori produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi terkait dengan peningkatan pendapatan adalah modal dan tenaga kerja (Sukirno, 2014). Sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi penyaluran dana ke sektor UMKM yang dimulai dengan dua skema kredit dari Bank Indonesia, yaitu Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Selain itu, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2011 yang mewajibkan bank untuk menyediakan 20% dari total pinjaman mereka untuk usaha kecil. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mendorong bank meningkatkan penyaluran dana ke sektor UMKM yang

digunakan sebagai modal. Perbankan pun mulai agresif menyalurkan kredit kepada UMKM. Bisnis UMKM tidak lagi dipandang sebagai bisnis kelas dua.



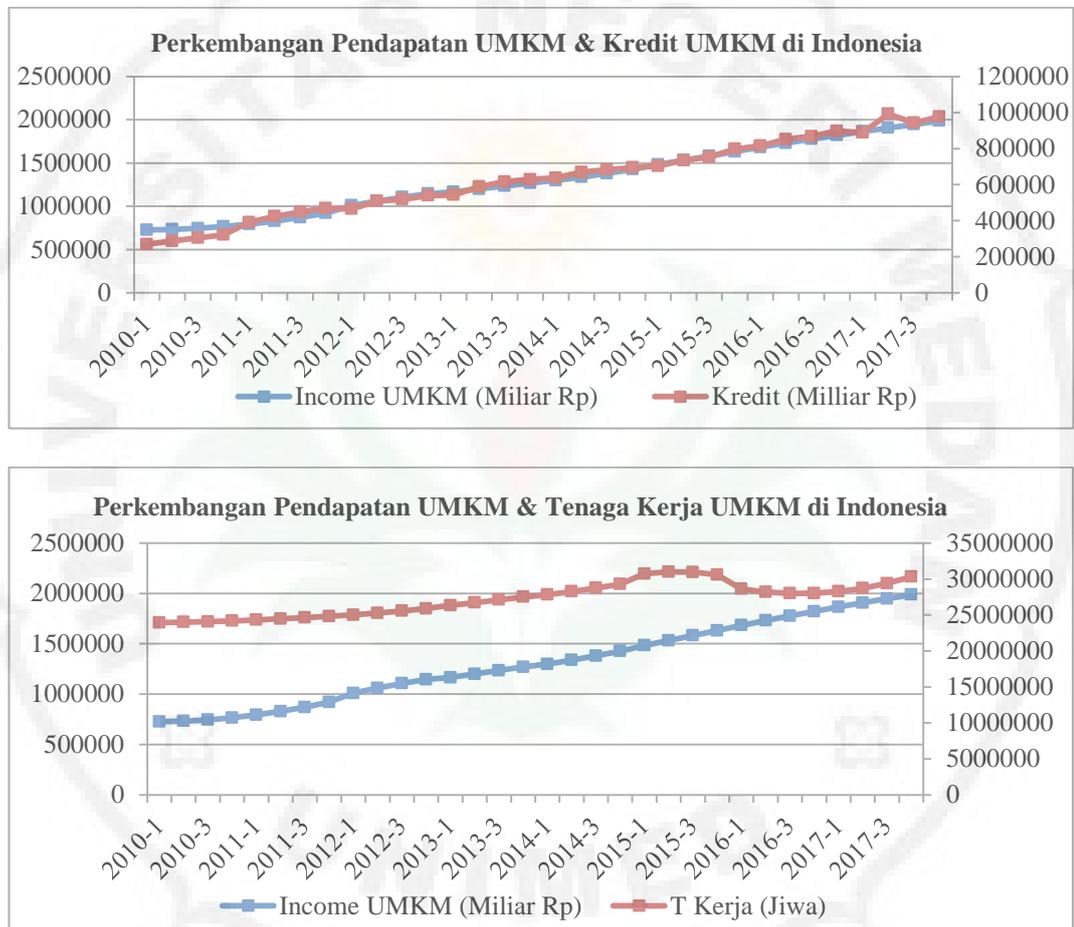
Sumber : Bank Indonesia (2018)

Gambar 1.2 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Oleh Bank di Indonesia Tahun 2010-2017

Terbukti, penyaluran kredit ke sektor UMKM lambat laun mengalami pertumbuhan. Penyaluran kredit perbankan tahun 2017 porsi terbesar masih dipegang oleh Bank Persero, yaitu sebesar 499.073 miliar, dan BPR-BPRS sebesar 47.990 miliar. Sementara Bank Swasta Nasional sebesar 361.133 miliar, BPD 74.972 miliar, Bank Campuran sebesar 6.445 miliar dan Bank Asing sebesar 763 miliar (Laporan Bank Indonesia, 2018).

Secara empiris, penelitian tentang pengaruh kredit perbankan terhadap perkembangan UMKM telah banyak dilakukan, diantaranya Kasmir (2011) menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, karena pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Temuan hasil ini juga didukung temuan empiris oleh Setiawina (2005) yang mengatakan bahwa pemberian kredit dan modal berpengaruh positif terhadap penghasilan kotor UKM. Begitu juga penelitian oleh Purnamayanti, dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa pemberian

kredit mikro adalah program jumlah kredit berjumlah kecil kepada usaha kecil untuk membiayai kegiatan produktif yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan.



Gambar 1.3 Perkembangan Pendapatan UMKM, Kredit Perbankan, Tenaga Kerja UMKM di Indonesia pada 2010:1-2017:4

Berdasarkan gambar 1.3 di atas jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada triwulan IV-2010 sebesar 24.183.970 orang atau 0,52% dari total penggunaan tenaga kerja nasional. Usaha Mikro masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yang mencapai 93,01 juta orang atau 90,98% dari total tenaga kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan UMKM sebagai katup penyerap tenaga kerja nasional yang berdampak pada stabilitas sosial dan perekonomian nasional. Pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun terakhir

mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2009 terjadi penurunan. Skala usaha yang penyerapan tenaga kerjanya menurun hingga negatif adalah skala usaha menengah dan besar yang masing-masing sebesar -0,61% dan -2,96%, sedangkan usaha mikro masih tetap tumbuh sebesar 2,51%.

Penggunaan tenaga kerja oleh UMKM selama periode 2011 sampai dengan Maret 2012 menunjukkan sebagian besar responden UMKM sebanyak 74% masih menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Walaupun terdapat UMKM yang mengurangi penggunaan tenaga kerja sebanyak 11% tetapi UMKM yang menambah jumlah tenaga kerjanya juga lebih tinggi yaitu sebesar 15%. Apabila dikaitkan dengan penurunan omset penjualan terlihat bahwa UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan juga diikuti dengan penurunan jumlah tenaga kerja tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit.

Kondisi ini mencerminkan penggunaan tenaga kerja selama masa perlambatan ekonomi dunia relatif tidak berubah sehingga dapat dikatakan UMKM mampu menjaga kestabilan kondisi ketenagakerjaan di masa depan. UMKM yang melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja, sebagian besar disebabkan alasan karyawan mengajukan pengunduran diri yaitu sebesar 43% sedangkan sisanya beralasan melakukan PHK, tidak memperpanjang kontrak dan merumahkan pegawainya. Tingginya alasan pengunduran diri tidak terlepas dari karakteristik tenaga kerja yang cenderung mudah untuk keluar dan masuk dalam usaha UMKM.

Pada triwulan IV- 2014, penyaluran kredit perbankan juga naik menjadi 694,978.26 Miliar dan pendapatan UMKM terus meningkat. Bahkan, ketika suku bunga harus naik, penyaluran kredit perbankan turun yang menghasilkan

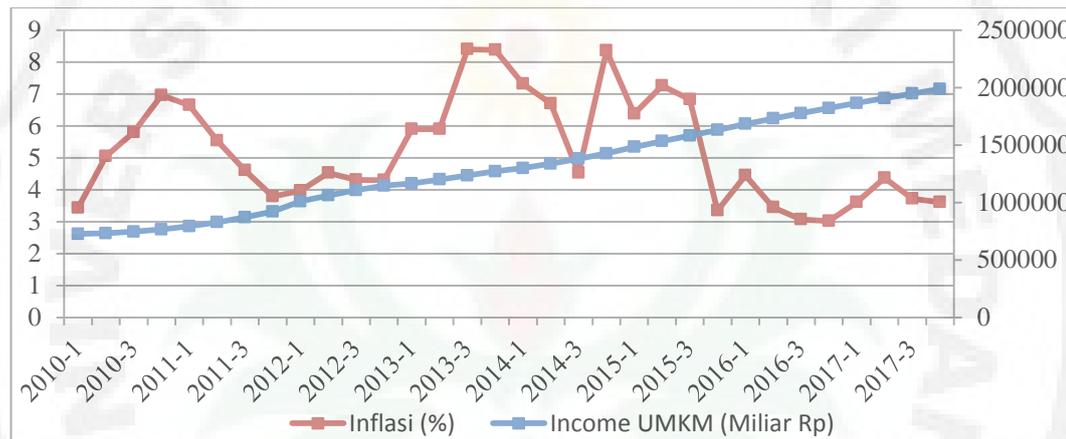
penurunan pendapatan UMKM di Indonesia. Pada triwulan I-2016 sampai triwulan-III-2016, ketika jumlah tenaga kerja turun, pendapatan UMKM terus meningkat. Bahkan, penurunan jumlah tenaga kerja mempengaruhi proses produksi.

Kemudian, pada triwulan I-2017, ketika suku bunga turun, penyaluran kredit perbankan juga turun menjadi 888.373,03 miliar dan pendapatan UMKM terus meningkat sebesar 1.459.902 miliar. Bahkan, ketika suku bunga turun, penyaluran kredit perbankan telah meningkat yang mengakibatkan peningkatan pendapatan UMKM di Indonesia. Karena fenomena yang bertentangan dengan teori produksi, menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di Indonesia.

Inflasi juga menarik perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Karena ketika terjadi inflasi yang tinggi maka nilai riil uang akan turun, keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan mengakibatkan nasabah berpotensi penarikan uang dari perbankan juga berdampak pada perbankan sehingga bunga UMKM ikut naik. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi (Sukirno, 2014).

Inflasi merupakan kenaikan dalam harga-harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran harga di pasar (Sudarsono, 2008). Kestabilan tingkat inflasi sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Apabila tingkat atau kondisi

inflasi yang stabil, maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi. Gejala inflasi yang signifikan akan mengganggu kestabilan perekonomian. Dampak adanya inflasi yang tinggi akan merugikan banyak golongan masyarakat terutama pendapatan UMKM.



Gambar 1.4 Perkembangan Pendapatan UMKM, Inflasi di Indonesia Tahun 2010:1-2017:4

Pada awal tahun 2012 Pemerintah berencana untuk menaikkan harga jual bahan bakar minyak dalam negeri yang bersubsidi, walaupun pada perkembangannya kenaikan ini ditunda. Atas rencana kenaikan harga BBM tersebut digali informasi dari responden apakah kenaikan harga BBM mempunyai dampak negatif terhadap kinerja usaha UMKM. Sebagian besar responden UMKM sebanyak 72% merasakan adanya dampak negatif atas rencana kenaikan harga BBM, sedangkan yang tidak merasakan dampak hanya sebesar 28%. Apabila digali lebih lanjut mengenai seberapa besar dampak negatif yang dirasakan oleh responden UMKM menunjukkan dampak negatif skala berat sebesar 42%, skala sedang sebesar 43% dan skala ringan hanya sebesar 15%. (Laporan Tahunan Kementerian Keuangan, 2012).

Tekanan inflasi pada triwulan III-2013 secara umum meningkat bila dibandingkan dengan triwulan II-2013. Perkembangan tersebut terutama disebabkan dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah pada akhir Juni 2013. Kenaikan harga BBM bersubsidi mendorong inflasi *administered prices* meningkat tinggi dari 6,7% *year of year* (yoy) pada Juni 2013 menjadi 15,5% (yoy) pada September 2013. Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan inflasi IHK secara tahunan tercatat 8,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Juni 2013 sebesar 5,9% (yoy).

Tekanan inflasi triwulan III-2013 meningkat sehingga tidak semua UMKM mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Beberapa UMKM yang berorientasi ekspor mengalami penurunan omset penjualan, seperti kerajinan mebel dan ukiran kayu, karena berkurangnya permintaan dari pasar internasional. Menurunnya pendapatan UMKM tersebut akan berdampak pada penurunan aktivitas UMKM yang dapat berpotensi menurunkan tingkat pendapatan pelaku UMKM dan peningkatan tingkat pengangguran. Berbagai dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM pada beberapa krisis yang lalu semestinya menjadi masukan berharga dalam menetapkan kebijakan pemerintah terkait antisipasi terhadap krisis-krisis yang kemungkinan akan terjadi, yang salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan program KUR. Kenyataan ini menunjukkan sesuai dengan teori Keynes.

Menurut teori Keynes hubungan inflasi terhadap pendapatan, inflasi meningkat terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar kemampuan ekonominya maka pendapatan riil masyarakat akan menurun (Efek batas ekonomisnya). Permintaan masyarakat akan alokasi *input* melebihi jumlah *output*

yang tersedia, sehingga muncul *inflationary gap*. Efek inflasi terhadap alokasi *input*, inflasi meningkat biaya produksi meningkat, maka kenaikan biaya produksi barang pada gilirannya akan merubah pola alokasi *input* yang sudah ada. Efek inflasi terhadap *output*, inflasi meningkat, pendapatan riil turun, konsumsi turun, *output* turun (Boediono, 1999:110).

Berdasarkan kondisi yang kurang menguntungkan tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan UMKM. Perhatian untuk mengembangkan UMKM setidaknya dilandasi oleh beberapa alasan. Salah satunya yaitu, UMKM banyak menyerap tenaga kerja. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak UMKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di daerah, pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi (Kuncoro, 1996).

Dari sisi kebijakan, UMKM jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Demi mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh usaha mikro kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha mikro kecil yang mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Disamping itu juga usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul. Sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan PDB UMKM semakin meningkat

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil topik dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Pengembangan UMKM sangat sentral karena dapat meningkatkan jumlah UMKM di setiap tahunnya dan peningkatan jumlah tenaga kerja yang di serap. Kedudukan UMKM dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlah unit UMKM yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. UMKM juga memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika benar-benar dikembangkan dengan baik.

Kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Tenaga kerja yang belum memiliki kemampuan yang memadai karena kurangnya pelatihan pada tenaga kerja, kelemahan akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses untuk mendapatkan bantuan modal dari bank, kelemahan akses pada informasi dan teknologi yang terbaru, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Berpengaruh Penyaluran Jumlah Kredit Perbankan, Tenaga Kerja UMKM dan Inflasi Terhadap Pendapatan UMKM di Indonesia Baik Jangka Pendek dan Jangka Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Penyaluran Jumlah Kredit Perbankan, Tenaga Kerja UMKM dan Inflasi Terhadap Pendapatan UMKM di Indonesia Baik Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di Indonesia.
 - b. Penelitian diharapkan bagi civitas akademika dapat menambah informasi atau sumbangan pemikiran dan bahan kajian penelitian.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.
 - b. Hasil analisis pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dipakai sebagai informasi bagi Pemerintah, hasil yang diperoleh bisa dipakai sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien yang terkait dengan pendapatan UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.